



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA ANTARA KOMISI VI DPR RI
DENGAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
PADA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2007-2008**

Senin, 17 Maret 2008

Setelah membaca, mengkaji penjelasan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan mendengarkan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Pasal 101 ayat (3) dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran pada tahun 2008 sebagaimana surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-1/MK.02/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penghematan anggaran Kementerian/Lembaga, Komisi VI DPR RI meminta agar penghematan anggaran ini tidak mengurangi optimalisasi keberlangsungan pengembangan program atau Kebijakan Pembinaan Koperasi dan UMKM khususnya di daerah-daerah.
2. Berkaitan dengan program pemotongan/penghematan anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, maka Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan tersebut lebih dalam dengan Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
3. Komisi VI DPR RI menyambut baik kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI pada tanggal 3 Maret 2008 tentang hapus-tagih Kredit Usaha Tani (KUT) sesuai dengan hasil keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Negara Koperasi dan UMKM RI tanggal 20 Juni 2006. Selanjutnya Komisi VI DPR RI meminta kebijakan tersebut direalisasikan secepatnya.

**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA**


H. SURYADHARMA ALI

**Jakarta, 17 Maret 2008
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**


DR. H. ANWAR SANUSI, SH. SE. MM